

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Wardhani et al. (2021) perusahaan adalah suatu entitas yang beroperasi dalam menghasilkan produk atau layanan yang dimaksudkan guna mencapai tujuan memperoleh keuntungan yang optimal. Tiap manajemen perusahaan senantiasa mengupayakan supaya usahanya dapat terus berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*) sehingga perusahaan senantiasa berupaya merancang strategi guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai perusahaan ialah salah satu faktor penentu bagi pihak investor dan pemangku kepentingan sehingga dapat mengevaluasi kinerja suatu perusahaan serta menentukan perkembangan jangka panjangnya (Riva & Nabilla, 2026). Penilaian tersebut tidak semata-mata berpijak pada kondisi keuangan kontemporer, melainkan juga merepresentasikan proyeksi pasar mengenai kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah di masa mendatang.

Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif serta semakin tingginya kepedulian terhadap isu keberlanjutan, perusahaan tidak lagi cukup apabila sekadar berorientasi pada perolehan laba, melainkan juga dituntut untuk menerapkan tata kelola korporasi yang efektif, mengelola struktur pendanaan secara optimal, serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara keberlanjutan. Temuan tersebut konsisten dengan kajian Nurhaliza dan Azizah (2023), yang menegaskan bahwa peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan primer bagi setiap entitas bisnis, mengingat bahwa nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kapabilitas

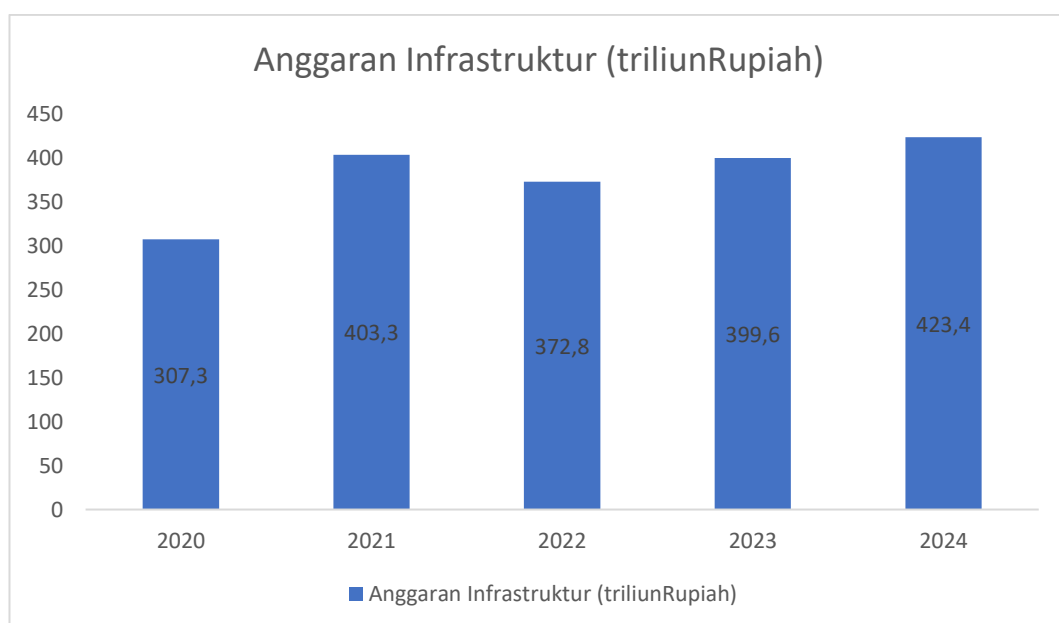
perusahaan dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tarik bagi calon investor guna melakukan penanaman modal.

Penelitian *firm value* dapat dilakukan melalui pendekatan pasar, di antaranya dengan memanfaatkan rasio PBV dan Tobin's Q. Rasio PBV berperan untuk melakukan perbandingan harga saham dengan nilai buku perusahaannya, sedangkan Tobin's Q digunakan untuk melihat apakah pasar memberikan nilai perusahaan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai aset yang dimiliki perusahaan (Risman, 2021). Pada studi ini, Tobin's Q dipilih sebagai proksi pengukur nilai perusahaan, karena indikator tersebut menyediakan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penilaian pasar terhadap kinerja serta prospek masa depan entitas bisnis.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki peran yang esensial karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah karena infrastruktur yang baik mampu meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas pokok oleh pemerintah guna meningkatkan produktivitas serta daya saing bangsa, sehingga dapat mendorong kemajuan Indonesia ke arah yang optimal. Hal tersebut sejalan dengan riset (Batuwael & Waluyo, 2023).

Berdasarkan gambar 1.1, anggaran infrastruktur dalam APBN menunjukkan tren cenderung meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Pentingnya strategis dari sektor infrastruktur, yang terus menjadi fokus utama kebijakan pemerintah, turut menjadi landasan pemilihan sektor tersebut dalam penelitian ini. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), alokasi anggaran infrastruktur menunjukkan tren

yang relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan kenaikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada periode 2022, anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp 372,8 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 399,6 triliun pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi Rp 423,4 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.



Sumber: APBN 2024

Gambar 1. 1 Anggaran Infrastruktur Tahun 2020-2024

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan mendorong peningkatan

keterlibatan sektor swasta melalui Program Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Meskipun sektor infrastruktur menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, kinerja perusahaan pada sektor ini masih dihadapkan pada beragam kendala. Salah satu persoalan krusial yakni tingginya tingkat utang pada perusahaan infrastruktur, khususnya pada perusahaan milik pemerintah yang bergerak pada bidang konstruksi, seperti PT WSKT dan WIKA, memanfaatkan pendanaan tersebut untuk mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur dengan skala besar. Tingginya beban utang tersebut berdampak pada tekanan kondisi keuangan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang guna menjaga keberlangsungan usaha (kumparan.com, 2023). Fakta tersebut diperkuat oleh studi kasus yang tercatat pada PT Waskita Karya Tbk yang mengalami gagal bayar kewajiban utang dan harus melakukan restrukturisasi utang (The Jakarta Post, 2023).

Selain itu, kinerja saham perusahaan sektor infrastruktur juga menunjukkan tren yang kurang stabil. Beberapa saham perusahaan konstruksi mengalami penurunan akibat sentimen negatif terkait tingginya utang dan kinerja keuangan perusahaan (indopremier.com, 2023). Hal ini mencerminkan adanya penurunan tingkat keyakinan investor terhadap prospek perusahaan, sehingga pada akhirnya memberikan dampak pada nilai perusahaan. Fenomena tersebut menunjukkan sisi perusahaan sektor infrastruktur dihadapkan pada kompleksitas permasalahan.

Kemudian penerapan GCG berkategori sebagai salah satu elemen penentu nilai perusahaan. Berdasarkan definisi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), GCG adalah sistem yang mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan

agar hubungan antar pihak di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG. Prinsip-prinsip dalam good governance mencakup lima elemen utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, *fairness*, tanggung jawab, dan independensi (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2023). Selaras dengan hal tersebut, POJK No 21/POJK.04/2015 mewajibkan Perusahaan Terbuka untuk melaporkan penerapan kaidah GCG sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan.

Organ *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri atas organ inti berupa RUPS, dewan komisaris (organ pendukung: komite audit, risiko, nominasi & remunerasi), direksi, serta unit internal audit & sekretaris perusahaan. Studi ini menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diterapkan melalui dewan komisaris independen karena memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan secara independen dan objektif. Selain itu, dewan komisaris independen juga membantu menjaga keadilan serta menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga mendorong penerapan prinsip GCG yang akuntabel dan independen (Rifai, 2009).

Leverage juga merupakan faktor krusial yang memengaruhi nilai perusahaan. Konsep *leverage* merujuk pada rasio yang menunjukkan tingkat penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya (Rois & Marwati, 2025). *Leverage* yang tinggi cenderung menurunkan kepercayaan investor terhadap saham perusahaan (Hidayat, 2019). Penelitian ini mengukur *leverage* menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), yang menunjukkan proporsi ekuitas pemegang saham untuk menutup utang perusahaan. DER membantu

investor di RUPS menyetujui pembiayaan utang optimal, sehingga return wajar tercapai. Dengan demikian, rasio *leverage* dapat digunakan investor untuk menganalisis apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar utangnya, hal ini menjadi pertimbangan investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Faktor lain yang turut memengaruhi firm value ialah CSR. CSR merupakan strategi penting yang diterapkan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang melalui tanggung jawab terhadap berbagai para pemangku kepentingan, mencakup *internal* maupun *eksternal* (Manik et al., 2025). Berdasarkan PP No 47 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (1), Pasal 2 secara tegas menetapkan bahwa tanggung jawab sosial serta lingkungan merupakan kewajiban mutlak bagi entitas usaha yang beroperasi di sektor sumber daya alam maupun bidang terkait. Perusahaan yang aktif menjalankan program sosial dinilai lebih bertanggung jawab dan memiliki reputasi baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar serta nilai perusahaan.

Dari pembahasan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa GCG yang diproksikan komisaris independen, *leverage*, serta CSR secara hipotesis berpotensi memengaruhi nilai perusahaan. Walau begitu, beragam kajian empiris terdahulu masih menghasilkan temuan yang inkonsisten, pada penelitian (Mayzona & Rusmanto, 2025) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut bertentangan dengan temuan (Irmalasari et al., 2022), (Prawijaya et al., 2023), serta (Wahyuningsih & Rakhmadhani, 2024) yang justru membuktikan bahwa komisaris independen

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga menandakan adanya kesenjangan penelitian yang patut dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, kajian ini secara khusus menganalisis dampak pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur melalui proporsi dewan komisaris independen, *leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *firm value* pada emiten sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2024. Kajian dimaksudkan untuk memperkaya khazanah literatur serta memperdalam wawasan tentang variabel-variabel penentu nilai perusahaan, terutama dalam sektor infrastruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada bagian sebelumnya, teridentifikasi sejumlah isu krusial yang akan dieksplorasi secara mendalam dalam kajian ini. Rumusan masalah penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen berpengaruh terhadap *firm value*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *firm value*?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *firm value*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diformulasikan dengan maksud untuk mewujudkan sejumlah capaian khusus, yang diantisipasi mampu menjawab rumusan masalah penelitian yang telah diformulasikan. Tujuan pokok yang ingin diraih melalui penelitian ini meliputi:

1. Menganalisa bagaimana *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan oleh komisaris independen mempengaruhi nilai sebuah perusahaan
2. Menganalisa bagaimana *Leverage* mempengaruhi nilai sebuah perusahaan
3. Menganalisa *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempengaruhi nilai sebuah perusahaan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kebermanfaatan yang diharapkan penulis dari pelaksanaan studi ini, baik secara teoritis maupun praktik, sebagai penyelesaian dari permasalahan yang diteliti disebut sebagai kegunaan studi.

1. Aspek Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan literatur akuntansi, khususnya dalam mengkaji dampak *Good Corporate Governance* yang diindikasikan oleh komposisi dewan pengawas independen serta *leverage* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi perluasan pengetahuan yang relevan di bidang tersebut.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman serta sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian empiris.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *firm value*, khususnya *Good Corporate Governance*, *leverage*, dan *Corporate Social Responsibility*, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami dan mengkaji penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun ke dalam lima bab pokok dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian beserta manfaatnya, serta garis besar struktur penulisan keseluruhan.

BAB II : LANDASAN LITERATUR

Bab ini memaparkan landasan teori dan kajian empiris terdahulu, kerangka konseptual pemikiran, serta hipotesis yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan prosedur pelaksanaan penelitian serta teknik analisis yang diterapkan terhadap topik kajian. Secara rinci, bab ini mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data,

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan menguraikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. Jika ada pada bagian ini dijelaskan juga rancangan model/desain/sistem yang diajukan untuk pemecahan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini, sebagai bagian penutup, memuat kesimpulan utama, batasan kajian, serta saran-saran yang direkomendasikan.